



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa



AGUSTUS 2025

MINGGU KE-1

BULETIN

KEMENKUM KALSEL NEWS



BULETIN KEMENKUM KALSEL 11082025



PELANTIKAN PPNS OLEH
KAKANWIL



PENGUKUHAN PENGURUS
BARU DWP



HARMONISASI RAPERDA
TANAH BUMBU

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Apel Pagi Awal Bulan Agustus, Tekankan Komitmen Kinerja dan Sinergi



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar Apel Pagi rutin pada Senin (4/8), yang dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Dameria Pardede, dengan pembina apel Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Anton Edward Wardhana.

Apel pagi yang berlangsung di halaman kantor ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial, Pejabat Non Manajerial dan seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam amanatnya, Kadiv P3H Anton Edward Wardhana menyampaikan harapan agar semangat kerja para pegawai semakin meningkat di awal bulan Agustus. Ia juga mengapresiasi capaian kinerja Kanwil yang telah masuk dalam 12 besar nasional.

“Kinerja kita sudah bagus. Namun saya berharap di semester kedua ini, kita bisa naik ke lima besar. Mari kita capai target kinerja, bahkan kalau bisa kita lampau,” ujar Anton Edward.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hari ini akan ada sesi penguatan dari Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem yang diharapkan menjadi masukan berharga dalam peningkatan kualitas kerja ke depan.

Kadiv P3H juga menekankan pentingnya komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat sinergi internal dan dengan mitra kerja. “Tiga kunci utama yang harus kita pegang adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi,” tegasnya.

Sebagai penutup apel, disampaikan pula kata-kata perpisahan dari Sevita, Analis SDM Aparatur Ahli Muda, yang akan berpindah tugas ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Kemenkum Kalsel Siap Ikuti Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN Tahun 2027



Banjarasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti kegiatan Pra Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara daring, pada Senin (04/08/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara serta mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum.

Kepala Biro Barang Milik Negara, Itun Wardatul Hamro, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan BMN serta memastikan ketepatan waktu penyusunan RKBMN. Kegiatan ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Indeks Pengelolaan Aset.



Dalam agenda tersebut, para peserta dari setiap unit kerja termasuk Kanwil Kemenkum Kalsel akan diberikan pembekalan dan pendampingan teknis mengenai penyusunan RKBMN menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi terbaru. Kanwil Kalsel sendiri dijadwalkan mengikuti sesi breakout room pada hari Kamis, 7 Agustus 2025 bersama Kanwil Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel menyambut baik kegiatan ini dan telah menugaskan pejabat serta operator pengelola BMN untuk berpartisipasi aktif. Kegiatan ini diharapkan mampu mendukung penyusunan perencanaan kebutuhan barang yang lebih akurat dan sesuai standar, serta meningkatkan kinerja tata kelola aset negara di wilayah Kalimantan Selatan.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Syukuran HUT ke-54 Banjarmasin Post, Perkuat Sinergi dengan Media



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) turut hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Banjarmasin Post yang digelar pada Senin (4/8/25), di Gedung Hj Djok Mentaya, Banjarmasin.

Melalui Bagian Tata Usaha dan Umum, kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel diwakili oleh Pranata Humas Ahli Muda Eko Sulistiyono dan Pranata Humas Ahli Pertama Joel P. Simanjuntak. Keterlibatan ini menjadi bagian dari upaya membangun dan memperkuat sinergitas dengan insan pers, khususnya Banjarmasin Post sebagai salah satu media utama di Kalimantan Selatan.

“Kehadiran Kemenkum Kalsel dalam momentum seperti ini mencerminkan komitmen kami untuk terus hadir di ruang-ruang strategis publik, termasuk perayaan institusi media. Ini adalah wujud keterbukaan dan penghargaan terhadap peran penting media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” terang Eko Sulistiyono.

Perayaan HUT ke-54 Banjarmasin Post mengangkat tema “54 Tahun Berlari: Kerja Cerdas, Hasil Nyata”. Dalam sambutannya, Pemimpin Perusahaan A Wahyu Indriyanta menegaskan arah baru Banjarmasin Post yang kini lebih fokus memperkuat peran di dunia digital sebagai bagian dari transformasi media masa kini.

Kegiatan berlangsung hangat dan lancar, ditutup dengan ramah tamah antara manajemen Banjarmasin Post dan seluruh tamu undangan. Prosesi pemotongan tumpeng turut dihadiri oleh Pangeran H Rusdi Effendi AR, selaku Pemimpin Umum Banjarmasin Post Group.

Kemenkum Kalsel berharap, momentum ini semakin mempererat relasi positif dengan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan hukum di Kalimantan Selatan.

Kanwil Kemenkum Kalsel Harmonisasi Ranperbup HSU tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Puskesmas



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Hulu Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Senin (04/08).

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, dan dihadiri oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten HSU, antara lain Kepala Bagian Hukum Setda HSU, Inspektur Daerah HSU, serta Kepala Dinas Kesehatan HSU.

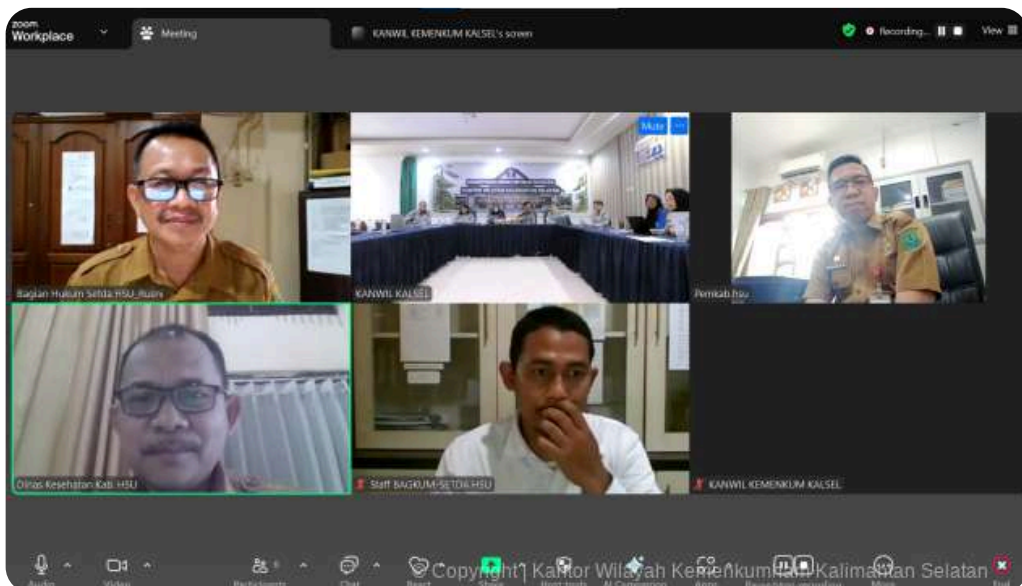
Usulan perubahan terhadap Perbup Nomor 36 Tahun 2022 ini merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten HSU untuk menyesuaikan regulasi yang ada dengan kondisi terkini, terutama dalam hal pemanfaatan pendapatan oleh Puskesmas sebagai unit layanan umum daerah.

Melalui pembahasan bersama, tim harmonisasi melakukan penelaahan aspek legal dan teknis normatif terhadap draf Ranperbup untuk memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendorong efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, dalam penutupan rapat menyampaikan pentingnya pemanfaatan aplikasi e-Harmonisasi agar pelaksanaan harmonisasi lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik secara digital.



Audit Kinerja Berbasis Risiko Jadi Fokus Harmonisasi Ranperbup HSU di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pengawasan internal yang lebih efektif, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Hulu Sungai Utara tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten HSU, Senin (04/08).

Rapat harmonisasi ini dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, serta diikuti oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Kalsel, Kepala Bagian Hukum Setda HSU, Inspektur Daerah HSU, dan jajaran terkait lainnya.

Ranperbup ini disusun sebagai upaya memberikan pedoman audit kinerja yang lebih komprehensif dan berorientasi pada hasil. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis risiko, audit yang dilakukan tidak hanya fokus pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menilai efektivitas pencapaian target kinerja yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan pedoman ini, Pemerintah Kabupaten HSU berupaya menyelaraskan dengan pedoman nasional, memfokuskan pengawasan pada area yang berisiko tinggi, serta memperkuat kredibilitas auditor internal.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, menyampaikan bahwa harmonisasi seperti ini penting untuk memastikan kejelasan norma dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ia juga mendorong pemanfaatan aplikasi e-Harmonisasi dalam proses harmonisasi peraturan daerah secara digital dan transparan.



Kakanwil Kemenkum Kalsel Berikan Penguatan Kinerja dan Evaluasi Capaian Triwulan II Sekaligus Dorong Percepatan Rencana Aksi



Banjarmasin, Humas_Info – Senin (04/08/2025), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, memimpin langsung kegiatan Penguatan Kinerja dan Evaluasi atas Capaian Kinerja Triwulan II serta percepatan rencana aksi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang digelar sebagai bentuk monitoring dan akselerasi capaian target kinerja ini dipandu oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Rustam Sakka, dan diikuti oleh seluruh jajaran manajerial dan non manajerial di lingkungan Kanwil. Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan pentingnya percepatan implementasi rencana tindak lanjut hasil pembahasan komisi dan menargetkan agar seluruh unit kerja dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, menyampaikan hasil pembahasan Komisi 3A yang mencakup isu-isu strategis seperti peningkatan kualitas layanan AHU, pembinaan dan pengawasan notaris, serta optimalisasi pendaftaran jaminan fidusia dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, turut memaparkan hasil Komisi 2A dan 2B yang menyoroti antara lain: peningkatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, penguatan peran kantor wilayah dalam analisis dan evaluasi perda, hingga peningkatan kapasitas SDM perancang dan penyuluh hukum.



Pada sesi berikutnya, Kepala Bagian Umum dan TU, Rustam Sakka, menyampaikan hasil evaluasi internal Bagian Umum, termasuk capaian indikator kinerja, perencanaan anggaran, pengelolaan BMN, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini merujuk pada hasil pembahasan Komisi 1A yang menekankan pentingnya optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta penyelesaian tindak lanjut temuan audit dan peningkatan nilai SAKIP dan IKPA.

Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dapat lebih sinergis dalam menyukseskan agenda reformasi hukum dan pencapaian target kinerja nasional Kementerian Hukum.



Hasil Seleksi PJA 2025 dan Pelatihan Parletak: Perwakilan Kalsel Raih Gelar NLP dan CPLA – Kemenkum Kalsel Dorong Pembentukan Posbankum di Seluruh Desa dan Kelurahan



Banjarmasin, P3H_Info – Peacemaker Justice Award (PJA) merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada lurah dan kepala desa yang berperan aktif dalam membantu penyelesaian masalah hukum di wilayahnya. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat akses terhadap keadilan, khususnya melalui peran mereka sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat secara damai.

Melalui PJA, para kepala desa dan lurah tidak hanya mendapatkan penghargaan, tetapi juga pelatihan dan pendidikan mengenai mediasi serta pendampingan hukum. Hal ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan restoratif dan budaya damai dalam penyelesaian sengketa di tingkat komunitas.

Salah satu kegiatan utama dalam rangkaian PJA adalah Peacemaker Training, yakni pelatihan bagi kepala desa dan lurah untuk menjadi Non Litigation Peacemaker (NLP) atau juru damai non-litigasi. Di Kalimantan Selatan, sebanyak 18 kepala desa/lurah dinyatakan lulus dan resmi menyandang gelar non-akademik NLP.

Dalam upaya memperluas akses keadilan di tingkat akar rumput, para kepala desa dan lurah juga mendorong warganya mengikuti Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak). Dalam pelaksanaan Parletak I, sebanyak 17 orang dari wilayah Kalimantan berhasil meraih gelar non-akademik Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA), sementara peserta Parletak II masih dalam tahapan aktualisasi.

Antusiasme tinggi dari para kepala desa dan lurah dalam mengikuti Peacemaker Training membuahkan hasil positif. Sebanyak tiga perwakilan dari Kalimantan Selatan berhasil lolos seleksi sebagai penerima Peacemaker Justice Award 2025, yakni: 1. Enny Agustini, Lurah Telaga Biru, Kota Banjarmasin; 2. Sri Utari, Kepala Desa Ribang, Kabupaten Tabalong; 3. Endro Swasono, Kepala Desa Sumber Mulia, Kabupaten Tanah Laut.

Menanggapi hasil tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, menyampaikan apresiasi dan harapan agar prestasi ini menjadi inspirasi bagi desa/kelurahan lainnya.

“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan pada tahun 2025 mencatatkan 18 kepala desa/lurah yang meraih gelar NLP, dan 17 peserta Parletak yang memperoleh gelar CPLA. Selain itu, tiga kepala desa/lurah terpilih sebagai penerima Peacemaker Justice Award 2025 dan akan hadir dalam acara penerimaan di Jakarta. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta, baik dari PJA maupun Parletak. Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi kepala desa dan lurah lainnya untuk turut serta dalam gelaran PJA di tahun-tahun mendatang,” papar Anton.

Senada dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menegaskan pentingnya memperluas jangkauan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan.

“Mengingat manfaat dan kontribusi layanan Posbankum dalam mempermudah masyarakat mengakses keadilan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan akan mendorong pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna menyukseskan pembentukan Posbankum di Kalimantan Selatan,” ungkap Alex.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan semakin banyak masyarakat desa dan kelurahan yang mendapatkan akses hukum yang inklusif, efektif, dan berkeadilan.



Kanwil Kemenkum Kalsel Jalin Koordinasi Layanan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Balangan



Balangan, KI_Info – Dalam rangka memperkuat sinergi dan memperluas pemahaman mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Tim Layanan KI melaksanakan kegiatan silaturahmi dan koordinasi bersama dua instansi strategis di Kabupaten Balangan, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), pada Senin (4/08/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam mendukung pendaftaran dan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk hak cipta maupun inovasi daerah.

Koordinasi dengan Bapperida difokuskan pada pemetaan dan pendataan inovasi-inovasi yang berpotensi didaftarkan sebagai hak cipta. Melalui komunikasi yang terjalin, kedua pihak sepakat pentingnya membangun sistem pendataan dan perlindungan terhadap inovasi lokal yang telah maupun akan dikembangkan di Kabupaten Balangan.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Disbudporapar, pembahasan difokuskan pada penguatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan KI di sektor kebudayaan dan pariwisata. Pihak Disbudporapar turut menyampaikan harapan agar Tim Layanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel dapat berpartisipasi dalam event pameran yang akan digelar pada bulan Agustus 2025. Partisipasi tersebut diharapkan dapat memberikan layanan langsung kepada masyarakat terkait konsultasi dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Secara terpisah Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen nyata dalam memperluas layanan hukum dan perlindungan KI hingga ke daerah-daerah. Ia berharap kerja sama yang telah dibangun dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, serta para inovator di Balangan.



Sosialisasi dan Fasilitasi HKI di Balangan, Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong UMKM Lindungi Karya Lewat Pendaftaran Kekayaan Intelektual



Balangan, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya dan produknya. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan bersama Disbudporapar Kabupaten Balangan, Senin (4/8).

Mengangkat tema "Membangun Kesadaran Pentingnya Kekayaan Intelektual", kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Ar Raudhah Syariah, Kabupaten Balangan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan, dan Pengembangan SDM Pariwisata Dispar Kalsel, dan dilanjutkan dengan sesi talkshow yang menghadirkan Tim Layanan Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai narasumber utama.

Dalam pemaparannya, tim menjelaskan pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Materi yang disampaikan mencakup prosedur pendaftaran, persyaratan administrasi, serta tips untuk menghindari penolakan akibat kesamaan nama atau kelas merek.

Usai sesi talkshow, kegiatan dilanjutkan dengan konsultasi dan pendampingan langsung bagi peserta. Para pelaku usaha mendapat kesempatan untuk melakukan pengecekan awal terhadap kelengkapan dokumen dan kelayakan pendaftaran produk mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di kemudian hari.

Sebanyak 46 pelaku UMKM dari berbagai sektor di Kabupaten Balangan mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusiasme. Peserta tidak hanya mendapatkan wawasan baru, tetapi juga pendampingan teknis yang dibutuhkan untuk mengamankan kekayaan intelektual dari produk atau jasa yang dimiliki.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pihaknya dalam menghadirkan layanan hukum yang dekat dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif kolaboratif ini, karena membangun kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual harus dimulai dari tingkat daerah, utamanya bagi pelaku UMKM. Tim kami hadir untuk memastikan mereka tidak hanya mendapat informasi, tapi juga pendampingan yang konkret agar proses pendaftaran HKI dapat berjalan dengan lancar dan tepat. Ini bagian dari komitmen kami dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat,” ujar Alex Cosmas Pinem secara terpisah.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Balangan semakin memahami nilai strategis dari perlindungan hukum atas hasil kreativitas, serta mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual produk melalui pendaftaran kekayaan intelektual secara resmi.

Pembukaan Latsar CPNS 2025, Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Pembentukan ASN Berintegritas



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti secara virtual kegiatan pembukaan Latihan Dasar Kepemimpinan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025, Selasa (5/8/2025).

Kegiatan ini turut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, sejumlah pejabat manajerial dan pejabat non manajerial serta para CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Pembukaan kegiatan dilakukan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang dalam arahannya menyampaikan sejumlah pesan penting sebagai bekal awal bagi para CPNS dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

“Proses belajar tidak berhenti di bangku sekolah. ASN harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya,” ujar Nico.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam bekerja. Menurutnya, integritas bukan sekadar kejujuran, tetapi juga mencerminkan bagaimana seseorang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

“Masyarakat menuntut ASN yang beretika tinggi, bahkan saat kita sudah berbuat baik pun tetap bisa dinilai kurang. Karena itu, etika dan integritas harus selalu dijaga,” tegas Nico.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar para CPNS memahami secara mendalam tugas dan wewenang masing-masing, serta memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab yang diemban dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Latsar CPNS sebagai langkah strategis dalam membentuk ASN yang berintegritas dan profesional.

“Latihan dasar ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi penting dalam membangun karakter ASN yang beretika, memiliki semangat pelayanan, dan mampu menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Alex.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kanwil Kemenkum Kalsel Gandeng Puskesmas Alalak Selatan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Puskesmas Alalak Selatan mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 5 Agustus 2025, bertempat di Gedung Olahraga Kanwil Kementerian Hukum Kalsel.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif melalui program deteksi dini dan promosi kesehatan di tempat kerja. Jenis layanan yang diberikan mencakup pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta konsultasi kesehatan umum.

Perwakilan dari Puskesmas Alalak Selatan menyampaikan bahwa kegiatan ini termasuk dalam pelayanan kesehatan luar gedung untuk menjangkau kelompok usia produktif di berbagai instansi.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami berfokus pada deteksi dini untuk mencegah risiko penyakit tidak menular yang banyak dialami oleh kelompok usia produktif,” ujar salah satu petugas medis.

Kegiatan ini disambut antusias oleh seluruh pegawai dari berbagai jenjang, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, yang mengikuti pemeriksaan secara bergiliran dengan tertib.

Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkualitas.

Melalui sinergi ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menegaskan komitmen dalam menjaga kesehatan sumber daya manusia sebagai bagian integral dari pelaksanaan tugas dan pelayanan publik yang optimal.



CPNS Kemenkum Kalsel Ikuti Arahan Kepala BPSDM Hukum: Dibekali Nilai-Nilai Dasar ASN Profesional



Banjarmasin, Humas_Info - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti secara virtual arahan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam rangka pembekalan nilai-nilai dasar sebagai Aparatur Sipil Negara, Senin (05/08/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan dasar (Latsar) CPNS Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum melalui BPSDM Hukum, guna membentuk karakter ASN yang berintegritas, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa ASN harus menjadi agen perubahan, pelayan publik, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

"ASN bukan hanya profesi, tetapi panggilan untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan integritas," ujarnya.

Gusti Ayu Putu Suwardani juga memaparkan nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam akronim BERAKHLAK, yaitu: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini, menurutnya, menjadi pedoman utama dalam setiap sikap dan tindakan ASN di lingkungan Kementerian Hukum.

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya Tata Nilai ASN Kemenkum sebagai "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif" (PASTI). CPNS diminta untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut sejak awal masa pengabdiannya.

"Jadilah ASN Kemenkum yang membawa semangat PASTI dalam pelayanan hukum. Tunjukkan bahwa kita hadir sebagai solusi dan bukan sekadar pelengkap sistem birokrasi," pesan Gusti Ayu.

Kegiatan ini juga disambut positif oleh para CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel yang tengah menjalani Latsar. Dengan arahan dan pembekalan ini, diharapkan mereka dapat mengemban tugas sebagai abdi negara yang tidak hanya cakap secara kompetensi, tetapi juga kuat secara karakter dan etika.



Tingkatkan Tata Kelola, Kemenkum Kalsel Ikuti Evaluasi Laporan Keuangan Semester I 2025

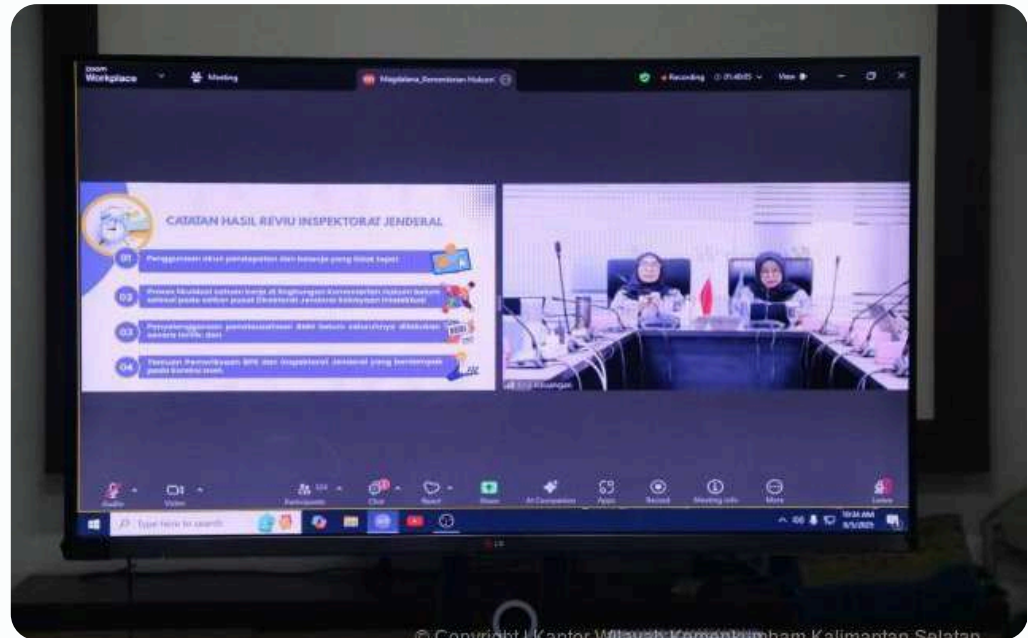


Banjarmasin, Humas_Info – Tim Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti secara daring kegiatan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Selasa, (05/08/2025). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan di seluruh satuan kerja.

Evaluasi ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan arahan strategis serta membahas berbagai temuan dan kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dalam paparannya, pimpinan kementerian memberikan apresiasi atas kinerja satuan kerja yang telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, sekaligus menekankan pentingnya penyelesaian isu-isu krusial seperti ketidaktepatan penggunaan akun, penyelesaian proses likuidasi, dan penatausahaan BMN yang masih belum tertib.

Sejumlah catatan hasil revidi Inspektorat Jenderal juga menjadi sorotan, antara lain perlunya koreksi akun pendapatan hasil lelang, realisasi anggaran belanja yang masih nol persen hingga pertengahan tahun, serta temuan terkait aset tetap yang belum dikoreksi.

Kehadiran daring Tim Keuangan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta kesiapan dalam menghadapi proses penyusunan dan pelaporan keuangan pada semester berikutnya dengan lebih tertib dan akurat.



Kanwil Kementerian Hukum Kalsel Ikuti Persiapan Anugerah Legislasi Daerah 2025 secara Daring



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Persiapan Anugerah Legislasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (05/08).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, Anton Edward Wardhana serta oleh jajaran Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kehadiran ini mencerminkan komitmen Kanwil Kalsel dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pembentukan peraturan daerah melalui mekanisme harmonisasi yang terukur dan akuntabel.

Kegiatan persiapan ini membahas secara teknis proses pelaksanaan Anugerah Legislasi Daerah Tahun 2025, termasuk pengunggahan dokumen pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui aplikasi SIPDDAH (Sistem Informasi Pengharmonisasian Peraturan Daerah). Pengunggahan dokumen dijadwalkan berlangsung mulai 6 hingga 19 Agustus 2025.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai kriteria penilaian, meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, ketercapaian target harmonisasi sesuai propemperda, serta partisipasi pimpinan tinggi dalam proses pembahasan rancangan peraturan.

Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kanwil Kalsel untuk meningkatkan kualitas pelayanan legislasi dan memperkuat sinergi internal dalam penyusunan regulasi daerah.

“Kami berkomitmen untuk melaksanakan proses harmonisasi secara profesional, transparan, dan tepat waktu sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum di daerah,” ujarnya.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan siap mendukung suksesnya Anugerah Legislasi Daerah Tahun 2025, serta memperkuat peran sebagai mitra strategis dalam pembentukan peraturan yang responsif dan berkualitas.



ULM dan DJKI Gelar Bimtek Desain Industri, Kanwil Kemenkum Kalsel Beri Dukungan Penuh



Banjarmasin, Humas_Info — Rabu (06/08/2025), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menyelenggarakan kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Desain Industri di General Building ULM, Banjarmasin.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada masyarakat, khususnya civitas akademika di perguruan tinggi, terkait prosedur permohonan desain industri yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Acara dibuka secara resmi oleh Plh. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Syahdi Hadiyanto, serta dihadiri oleh Kepala LPPM ULM, Prof. Sunardi, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah dan perguruan tinggi.

“Desain industri mencerminkan karakter dan keunikan produk. Kami berharap kegiatan ini memperkuat kesadaran dan pemahaman civitas akademika terhadap pentingnya perlindungan karya desain mereka,” ujar Meidy.

Rangkaian acara terdiri dari pemaparan materi oleh Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya, Krissantyo Adinda, dilanjutkan dengan sesi konsultasi teknis dan pendampingan langsung bagi peserta yang ingin memahami proses pendaftaran desain industri secara praktis.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan muncul lebih banyak inovasi desain orisinal dari Kalimantan Selatan yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga global.



Kakanwil Kemenkum Kalsel Kukuhkan Pengurus Baru DWP: Dorong Peran Strategis dalam Pembangunan Bangsa



Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, secara resmi mengukuhkan pengurus baru Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda pada Rabu (06/08). Kegiatan diawali dengan peresmian ruangan Sekretariat DWP Kanwil, sebagai upaya mendukung penguatan administrasi dan koordinasi organisasi.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, pejabat manajerial dan anggota DWP Kemenkum Kalsel. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan pataka kepada Ketua DWP baru, Herlina Alex Cosmas Pinem serta pemasangan pin simbolis kepada jajaran pengurus baru oleh Kakanwil yang juga merupakan Penasihat DWP Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam sambutannya, Ny. Puspita Meidy Firmansyah selaku Ketua Panitia kegiatan menyampaikan bahwa momentum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan momen penting penataan dan penyegaran struktur organisasi DWP.

“Dengan formasi pengurus yang baru, kami berharap DWP semakin kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan program-program kerja ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Alex Cosmas Pinem dalam arahannya menyampaikan harapannya agar DWP dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

“DWP merupakan mitra strategis dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Kedepannya kami harap program-program kreatif bisa di laksanakan,” tuturnya.

Pengukuhan ini diharapkan bisa meningkatkan peran aktif DWP Kanwil Kemenkum Kalsel untuk lebih berdaya dan berkontribusi dalam mendukung program-program Kementerian Hukum melalui peran para istri ASN dan pegawai di lingkungan Kanwil.

Dipimpin Ketua DWP Baru: Pertemuan Rutin Teguhkan Semangat Silaturahmi dan Kemandirian Anggota



Banjarmasin, Humas_Info - Usai prosesi pengukuhan pengurus baru, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melanjutkan kegiatan dengan pertemuan rutin organisasi, yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh Ketua DWP yang baru.

Pertemuan yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda pada Rabu (06/08) tersebut mengangkat tema "Peran Dharma Wanita Mempererat Silaturahmi dan Meningkatkan Kualitas Anggotanya untuk Mencapai Kemandirian."

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, para pejabat manajerial, serta pengurus dan anggota DWP Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam pertemuan ini, Ketua DWP menyampaikan pentingnya memperkuat silaturahmi antar anggota, sekaligus membangun semangat baru untuk meningkatkan kualitas pribadi dan organisasi. Ia menegaskan komitmen pengurus baru dalam mendukung pelaksanaan program-program kerja yang lebih terarah, inovatif, dan bermanfaat bagi para anggota.

Pertemuan rutin ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan evaluasi, rencana kerja, serta aspirasi dari anggota DWP, sekaligus forum komunikasi dan koordinasi internal organisasi. Melalui kegiatan ini, DWP Kanwil Kemenkum Kalsel diharapkan dapat terus menjadi organisasi yang aktif, solid, dan mampu memberikan dampak positif baik di lingkungan internal maupun masyarakat sekitar.





Kanwil Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Ranperbup Renstra Tapin 2025-2029



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Rabu (6/8/2025).

Rapat harmonisasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, serta jalannya rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Tapin, hadir Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tapin, Raden Chandra Nugraha beserta jajaran dan perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

Ranperbup ini memuat ketentuan penting yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas selama lima tahun mendatang. Di antaranya mencakup visi, misi, strategi, program, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang selaras dengan dokumen RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tapin, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam arahannya, Alex Cosmas Pinem menekankan pentingnya memastikan seluruh ketentuan dalam Ranperbup selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mendukung efektivitas implementasi kebijakan daerah.

“Harmonisasi ini bukan sekadar koreksi redaksional, tetapi bagian dari upaya kita bersama untuk memastikan peraturan yang dilahirkan benar-benar mampu menjadi pedoman teknokratis dan operasional bagi seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kadiv P3H Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa penyusunan Renstra perangkat daerah memiliki posisi strategis dalam menjamin kesinambungan program pembangunan di daerah.

“Dengan kerangka hukum yang jelas dan sistematis, diharapkan Renstra ini mampu menjadi instrumen penggerak bagi pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin,” ujarnya.

Rapat harmonisasi ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjamin kualitas peraturan perundang-undangan di tingkat lokal.



Pelantikan PPNS oleh Kakanwil Kemenkum Kalsel Perkuat Penegakan Hukum di Daerah



Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, secara resmi melantik dan mengambil sumpah tujuh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai instansi daerah di Kalimantan Selatan, Rabu (6/8/2025), bertempat di Balai Pertemuan Garuda (BPG) Kanwil Kemenkum Kalsel.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas penegakan hukum di daerah, khususnya dalam mendukung tugas pengawasan dan penindakan oleh instansi perangkat daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyag serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Pejabat Manajerial dan Pejabat Non Manajerial, Rohaniwan dan tamu undangan.

Tujuh PPNS yang dilantik berasal dari berbagai instansi strategis, antara lain Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan di beberapa kabupaten yakni:

(1) Reza Syahrin, S.E. – Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Tanah Laut; (2) Muhammad Noor, S.Sos. – Satpol PP Kab. Barito Kuala; (3) Nyoman Batola, S.H. – Satpol PP Kab. Barito Kuala; (4) Muhammad Rasyid, S.Sos. – Dishub Kab. Hulu Sungai Selatan; (5) Muhammad Kasyaf, S.T. – Dishub Kab. Banjar; (6) Herry Ariyanto, S.T. – Dishub Kab. Banjar; dan (7) Oma Era Ma'moon, M.Pd. – Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Hulu Sungai Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menegaskan pentingnya peran PPNS sebagai ujung tombak penegakan hukum di bidang-bidang khusus yang menjadi kewenangan instansinya.

“Jabatan ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga kewajiban untuk memberikan pelayanan yang adil dan profesional bagi masyarakat dan negara. Saya harap para PPNS yang baru dilantik dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Alex.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan PPNS mencerminkan sinergi nyata antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban hukum di daerah. Dengan pelantikan ini, diharapkan proses penyidikan administratif semakin tertib dan akuntabel sesuai koridor peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini juga menandai komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus membina dan memfasilitasi instansi daerah dalam penguatan fungsi penyidikan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gula Aren Tirawan Selangkah Lagi Go Nasional! DJKI Periksa Tahap Akhir Penetapan IG Kotabaru !



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Substantif Akhir Permohonan Indikasi Geografis (IG) Gula Aren Tirawan Kabupaten Kotabaru, Rabu (6/8/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bagian Tata Usaha ini dilaksanakan secara virtual bersama Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pemeriksaan ini menjadi tahap akhir sebelum IG Gula Aren Tirawan ditetapkan secara resmi melalui penerbitan sertifikat Indikasi Geografis oleh DJKI.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Eka Saprudin. Selanjutnya, Kelompok Masyarakat Pengrajin Gula Aren Tirawan (KMP-GAT) memaparkan deskripsi dokumen IG yang telah disusun, mencakup sejarah, teknik produksi, karakteristik khas, dan hubungan geografis dari produk Gula Aren Tirawan sebagai dasar permohonan perlindungan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut memberikan arahan dan menyampaikan dukungannya terhadap proses pengakuan ini.

“Kami sangat berharap agar Indikasi Geografis Gula Aren Tirawan ini dapat segera memperoleh legalitas hukum, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pengrajin di Desa Tirawan. Ini bukan hanya pengakuan terhadap produk lokal, tetapi juga penguatan identitas daerah dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakatnya,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli IG dari DJKI, disusul dengan diskusi interaktif bersama Tim Percepatan IG Kabupaten Kotabaru, Bapperida Kotabaru, MPIG, dan tim teknis lainnya. Dalam sesi tersebut, MPIG dan KMP-GAT menerima berbagai masukan teknis dari Tim Ahli, dan menyatakan komitmen untuk segera melakukan perbaikan terhadap dokumen deskripsi yang disorot.

Batas waktu perbaikan telah disepakati untuk kemudian disampaikan kembali kepada DJKI. Pemeriksaan ini menjadi penentu akhir dalam proses finalisasi IG Gula Aren Tirawan sebelum ditetapkan secara sah sebagai produk Indikasi Geografis yang dilindungi secara hukum.



Kemenkum Kalsel Ikuti Forum Nasional Bahas Penyesuaian Pidana dalam Perda Pasca KUHP Baru



Banjarmasin, Humas_Info — Jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan bagi perancang pada instansi pusat dan daerah secara daring, Rabu (06/08/2025).

Forum ini mengangkat tema penting dan aktual, yaitu "Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Kegiatan dibuka secara resmi oleh Dr. Dhahana Putra dan menghadirkan Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, sebagai pemateri utama.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Hukum menekankan bahwa seluruh peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana wajib disesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP yang baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Penyesuaian tersebut mencakup aspek kategorisasi tindak pidana, perubahan istilah kejahatan/pelanggaran menjadi tindak pidana, serta batas maksimum pidana kurungan dan denda.

Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, pemerintah berupaya menyediakan payung hukum untuk merevisi ketentuan pidana dalam berbagai regulasi, termasuk mengubah ketentuan dalam UU 12/2011 dan UU 23/2014 agar selaras dengan sistem pidana baru.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah, termasuk jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, untuk memahami langkah-langkah teknis penyesuaian pidana dalam produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan KUHP baru. Dengan mengikuti kegiatan ini, para perancang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan paradigma hukum pidana nasional yang baru.



Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Penguatan Kompetensi SDM Hukum Melalui Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda



Jakarta, Humas_Info – Dalam upaya mendukung peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara di bidang hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut ambil bagian dalam Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Angkatan II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum RI.

Kegiatan pembukaan pelatihan dilaksanakan secara hybrid, yakni daring secara langsung dan luring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 6 Agustus 2025 dan diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel, Anton Edward Wardhana. Pelatihan ini akan berlangsung selama dua bulan, mulai 5 Agustus hingga 7 Oktober 2025, dengan metode Blended Learning yang memadukan pembelajaran daring dan klasikal.

Sebanyak 32 peserta dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah ikut serta dalam pelatihan ini, termasuk Eldy Prasetya Setiawan, Analis Hukum Ahli Muda dari Kanwil Kemenkumham Kalsel, yang menjadi salah satu wakil Kalimantan Selatan dalam kegiatan tersebut.

Dalam keterangannya, Anton Edward Wardhana menyampaikan apresiasinya terhadap program pengembangan kompetensi ini.

“Pelatihan fungsional ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan jabatan, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas aparatur hukum di daerah. Kami berharap Eldy dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan hukum di Kalimantan Selatan,” ujar Anton.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam memperkuat peran analis hukum sebagai garda terdepan dalam pembentukan dan evaluasi regulasi. Pelatihan ini dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kapasitas analitis dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif dan solutif.



Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemko Banjarmasin Harmonisasikan Raperda Susunan Perangkat Daerah



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) memfasilitasi pelaksanaan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarmasin tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (7/8/25), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Rapat harmonisasi ini dilaksanakan menindaklanjuti permohonan dari Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin melalui surat Nomor 100.3/980/KUM/VII/2025. Dalam pelaksanaannya, rapat turut dihadiri oleh Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sebagai pemrakarsa, serta tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem yang dalam hal ini diwakili oleh Eryck Yulianto selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya menyampaikan pentingnya pelaksanaan harmonisasi untuk memastikan bahwa substansi Raperda tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga memenuhi prinsip pembentukan produk hukum yang baik dan tidak multitafsir.

“Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini merupakan dasar hukum kelembagaan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjalankan fungsi-fungsi layanan publik. Oleh karena itu, substansi dan strukturnya harus jelas, efisien, serta berbasis pada kebutuhan nyata daerah,” ujar Eryck.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Eka Rahayu Normasari Raperda ini disusun sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019. Penyesuaian tersebut juga mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas kelembagaan serta beban kerja masing-masing perangkat daerah.

Dalam pembahasannya, tim Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan catatan dan masukan teknis terhadap struktur konsideran, dasar hukum, hingga penjabaran fungsi dan nomenklatur perangkat daerah, termasuk usulan perumusan ulang beberapa norma agar lebih tegas dan tidak multitafsir.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian ringkasan hasil harmonisasi dan kesepakatan tindak lanjut untuk finalisasi naskah akademik dan Raperda oleh tim dari Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil koreksi bersama.



Dukung Regulasi Berkualitas untuk Tanah Bumbu, Kemenkum Kalsel Gelar Harmonisasi Raperda Waralaba dan Tenaga Kesehatan



Banjarmasin, P3H_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) berkolaborasi dalam memberikan penguatan perancangan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan berperan sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan secara virtual oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten HST, Kamis (31/7)25).

Kegiatan ini ditujukan untuk menambah wawasan dalam pembentukan dan penyusunan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Bupati) dengan melibatkan peserta dari jajaran Bagian Hukum serta perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten HST.

Nizar Al Farisy selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda hadir secara virtual mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebagai narasumber untuk menyampaikan paparan utama para kesempatan ini. Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk produk hukum daerah yang bersifat konkret, individual, dan final. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Dalam pemaparannya, Nizar menjelaskan secara teoretis perbedaan mendasar antara bentuk pengaturan (regeling) dan penetapan (beschikking), serta menekankan pentingnya landasan kewenangan dalam pembentukan Keputusan Kepala Daerah. Disampaikan pula bahwa pembentukan keputusan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Adapun dari segi teknis penyusunan, Keputusan Kepala Daerah harus mengikuti metode penyusunan peraturan perundang-undangan secara mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

“Kami berterima kasih karena telah diberikan pencerahan dan pemahaman seputar penyusunan Keputusan Bupati, dan dengan ini semakin memperkaya khazanah keilmuan kami dan akan menjadi bekal di jajaran Bagian Hukum maupun pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam membentuk Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan, yang mana pembentukannya dilakukan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penomoran, penandatanganan, pendokumentasian, pengautentifikasian, sampai dengan penyebarluasan,” ujar Taufik Rahman, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sesi diskusi yang berlangsung setelah pemaparan berlangsung aktif, dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan peserta mengenai penyusunan Keputusan Bupati yang baik agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tetap taat asas. Sejumlah peserta juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam implementasi keputusan yang telah ditetapkan.



Ranperda Administrasi Kependudukan Kabupaten Banjar Diharmonisasi Bersama Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) memfasilitasi pelaksanaan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Kamis (7/8/2025) di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Pemerintah Kabupaten Banjar dan dilaksanakan sebagai bentuk sinergi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Eryck Yulianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kanwil Kemenkum Kalsel, serta dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana mewakili Kepala Kantor Wilayah Alex Cosmas Pinem yang memberikan arahan teknis terkait perbaikan redaksional dan substansi agar Raperda dapat memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

“Harmonisasi ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan asas-asas hukum yang baik,” ujar Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Banjar, hadir Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Hayata Nufus beserta jajaran, serta Kepala Bagian Hukum Setda Banjar, Ahmad Rizal Putra. Para peserta aktif berdiskusi dan menerima berbagai masukan dari tim harmonisasi untuk menyempurnakan rumusan norma dalam Raperda.

Rancangan Perda ini disusun untuk menggantikan Perda Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 12 Tahun 2017, yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan dewasa ini.

Beberapa poin penting dalam pembahasan meliputi penguatan norma perlindungan data pribadi penduduk, digitalisasi layanan adminduk melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi teknis terbaru di bidang kependudukan.

Dengan difasilitasinya proses harmonisasi ini, diharapkan Raperda yang dihasilkan mampu menjadi dasar hukum yang kokoh dalam mendukung pelayanan publik yang tertib, akurat, dan akuntabel di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar.



Ranperda Penyertaan Modal Tabalong Diharmonisasi: Fokus pada Air Bersih dan Perbankan Rakyat



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Kamis (07/08/2025). Kegiatan ini berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama Bahjatul Mardhiah selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya.

Adapun dua Ranperda yang diharmonisasi adalah Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar.

Kedua Ranperda tersebut mengatur perihal penyertaan modal daerah, baik dalam bentuk barang milik daerah maupun uang, yang digunakan untuk memperkuat kapasitas usaha dan pelayanan publik oleh dua entitas badan usaha milik daerah.

Harmonisasi ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyelarasan substansi Ranperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta untuk memastikan tidak adanya pertentangan norma dalam penerapannya.

Anton Edward Wardhana menegaskan pentingnya harmonisasi agar produk hukum daerah memiliki legitimasi dan kesesuaian dengan kebijakan nasional. Hal senada juga disampaikan oleh Bahjatul Mardhiah, yang menjelaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam proses pembentukan produk hukum daerah agar memiliki kepastian hukum, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara efektif.

Dari hasil pembahasan, jajaran perancang Kanwil turut memberikan sejumlah saran teknis dan masukan normatif terkait penguatan redaksional maupun ketentuan substansi dalam draf kedua Ranperda tersebut.



Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Ranperda Penyertaan Modal kepada Pemkab Tabalong



Banjarmasin, Humas_Info – Usai pelaksanaan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Kamis (07/08/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyerahkan hasil harmonisasi dua Ranperda yang kepada perwakilan Pemkab Tabalong di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah.

Dokumen hasil harmonisasi diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, kepada perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tabalong. Turut mendampingi dalam penyerahan tersebut Bahjatul Mardhiah selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya yang juga memimpin proses harmonisasi.

Dua Ranperda yang telah melalui proses penyelarasan norma dan ketentuan peraturan ini adalah Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar.

Anton Edward menyampaikan bahwa dokumen hasil harmonisasi ini telah disesuaikan secara menyeluruh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Keuangan Negara, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Pemerintah terkait BUMD dan investasi daerah.

Dengan diberikannya hasil harmonisasi ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat melanjutkan proses legislasi pada tahapan berikutnya, yaitu fasilitasi oleh Gubernur serta pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam mendukung peningkatan kualitas regulasi di daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi peran BUMD untuk pelayanan publik dan peningkatan pendapatan asli daerah.



Lomba Domino Meriahkan Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menyelenggarakan lomba domino sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perayaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Olahraga Kanwil Kemenkum Kalsel pada Kamis (07/08/2025).

Lomba domino dengan animo yang tinggi ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel, juga turut serta perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, sportivitas, dan kekompakan antar pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi seluruh peserta yang telah menyemarakkan lomba dengan semangat dan antusiasme tinggi.

“Rangkaian Peringatan Hari Pengayoman sekaligus peringatan HUT RI ke-80 ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi antar unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya menjaga tradisi kebersamaan, tetapi juga membangun semangat kolektif untuk terus berkontribusi dalam tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alex.

Kegiatan lomba domino ini berlangsung dengan penuh semangat dan diwarnai suasana kekeluargaan. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan yang dilaksanakan secara sportif.



Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan 20 Sertifikat Merek dan 2 Surat Pencatatan Hak Cipta kepada UMKM Binaan Kabupaten Kotabaru



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melaksanakan kegiatan penyerahan 20 sertifikat merek bagi UMKM binaan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Kotabaru serta 2 surat pencatatan ciptaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Kabupaten Kotabaru, pada Kamis (7/8/2025) di Ruang Kabid Pelayanan KI.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara Tim Layanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel dengan Diskoperindag dan Bapperida Kabupaten Kotabaru, sebagai wujud sinergi dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual bagi para pelaku usaha dan inovator daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi menyampaikan komitmen penuh Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus mendampingi dan memfasilitasi pelaku UMKM serta pemilik karya cipta dalam proses pendaftaran KI. Ia juga menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dan ciptaan, serta memberikan edukasi terkait masa berlaku dan mekanisme perpanjangan sertifikat merek.

Diskoperindag Kabupaten Kotabaru mengapresiasi dukungan yang telah diberikan dan berharap agar kerja sama dan pendampingan dari Tim Layanan KI dapat terus terjalin di masa mendatang, guna mendorong kemajuan UMKM dan pengembangan inovasi lokal.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nyata Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung program nasional peningkatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.



Disaksikan Menkum, Mie Gacoan dan LMK SELMI Sepakat Berdamai

Bali - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian atas Sengketa Hak Cipta antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMi) dan PT Mitra Bali Sukses (MBS) yang memegang lisensi merek Mie Gacoan, Jumat (08/08/2025).

Supratman menjelaskan kedua pihak telah sepakat untuk berdamai dan PT MBS telah membayar kewajibannya kepada LMK SELMI. Bagi Supratman, momentum ini harus dilihat sebagai contoh baik dari kedua pihak untuk menghargai kekayaan intelektual, khususnya penghargaan kepada para pencipta musik.

“Momen perjanjian damai ini bukan hanya soal jumlah royalti yang dibayarkan, tetapi lebih penting adalah kebesaran jiwa kedua belah pihak. Mudah-mudahan dapat menjadi contoh teladan bagi semua warga Indonesia untuk menghargai hak kekayaan intelektual,” ungkap Supratman di Bali, didampingi Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira Pramita, serta perwakilan LMK SELMI, Ramsudin Manulang.

Menkum mengatakan bahwa Kementerian Hukum (Kemenkum) mendukung adanya transparansi terhadap pungutan royalti yang dilakukan oleh LMK maupun LMK Nasional (LMKN). Untuk itu, Kemenkum nantinya akan mengeluarkan Peraturan menteri Hukum yang baru untuk mengatur soal pemungutan royalti.

“Saya setuju bahwa koreksi terhadap transparansi, pungutan royalti, termasuk besaran tarifnya. Nanti akan kita bicarakan dan kita akan keluaran Permenkum yang baru yang mengatur itu,” ungkapnya.

Supratman juga menegaskan kalau royalti bukanlah pajak. Pasalnya, tidak ada sepeserpun royalti yang masuk ke pemerintah, melainkan semuanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

“Royalti bukan pajak, negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung dari royalti. Semua pungutan royalti itu disalurkan kepada yang berhak. Dan yang menyalurkan bukan pemerintah, tetapi oleh LMK atapun LMKN yang memungut royalti, salah satunya LMK Selmi. Oleh karena itu, kita akan meminta pertanggungjawabannya, untuk transparansinya akan kita umumkan ke publik,” kata Supratman.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, lanjut Supratman, jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan di Indonesia masih terbilang rendah padahal jumlah penduduk Indonesia lebih banyak dari Malaysia. Ia mengungkapkan LMK dan LMKN di Indonesia mengumpulkan royalti sebesar Rp270 miliar, sedangkan Malaysia bisa mengumpulkan Rp600-700 miliar setiap tahunnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Direktur PT MBS dijadikan tersangka atas dugaan pelanggaran hak cipta setelah dilaporkan oleh LMK Selmi. Sengketa ini kemudian dimediasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum Bali dengan tujuan mendapatkan kesepakatan damai.



Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyambut positif langkah damai yang ditempuh antara PT Mitra Bali Sukses selaku pemegang lisensi merek Mie Gacoan dan LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMi), sebagaimana difasilitasi dan disaksikan langsung oleh Menteri Hukum.

Menurutnya, penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur mediasi ini menjadi contoh nyata bagaimana permasalahan kekayaan intelektual dapat diselesaikan secara konstruktif, menjunjung penghargaan terhadap karya para pencipta musik sekaligus menjaga kepastian hukum.

"Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus mengedukasi dan membina pelaku usaha di wilayahnya agar memahami pentingnya pemenuhan kewajiban pembayaran royalti, transparansi pengelolaan, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga potensi sengketa serupa dapat diminimalisir," ucapnya.





Penyelesaian Sengketa Royalti Musik antara Mie Gacoan dan LMK SELMI, Kewajiban Pembayaran Disepakaiti Kedua Belah Pihak



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan turut menyambut baik tuntasnya sengketa royalti musik antara Mie Gacoan di Bali dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMi) yang difasilitasi langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Jumat (8/8/2025).

Sengketa yang bermula dari laporan masyarakat pada 26 Agustus 2024 terkait dugaan penggunaan musik secara komersial tanpa pembayaran royalti ini diselesaikan melalui kesepakatan damai.

Mengutip detik.com, Supratman menjelaskan lisensi menyeluruh (blanket license) yang dibayarkan mencakup periode 2022 hingga 2025. Pembayaran Rp 2,2 miliar tersebut juga meliputi semua gerai Mie Gacoan di Bali, Jawa, dan Sumatera yang berada di bawah PT Mitra Bali Sukses.

Alex Cosmas Pinem menilai, penyelesaian melalui mekanisme damai ini mencerminkan komitmen para pihak untuk menghargai karya intelektual sekaligus menjadi contoh penerapan prinsip keadilan restoratif.

“Kami memberikan turut mengambut baik keberhasilan penyelesaian sengketa ini. Langkah yang diambil tidak hanya mengakhiri permasalahan hukum, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa penggunaan karya musik dalam kegiatan komersial harus menghormati hak cipta dan disertai kewajiban pembayaran royalti kepada pihak yang berhak,” ujar Alex.

Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus melakukan pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi dengan pelaku usaha, seniman, dan masyarakat di Kalimantan Selatan terkait pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

“Peristiwa ini menjadi momentum bagi seluruh pelaku usaha di Kalsel untuk lebih sadar hukum dalam penggunaan karya cipta,” tambahnya.

Dengan tuntasnya sengketa ini, LMK SELMI akan menyampaikan keterangan kepada penyidik, sementara Menkum menyatakan akan berkomunikasi dengan Kapolda Bali untuk mendorong penghentian penyidikan atau penerapan keadilan restoratif. Direktur PT Mitra Bali Sukses juga menyampaikan bahwa pemutaran lagu di gerai Mie Gacoan akan kembali dilakukan setelah seluruh proses hukum rampung.

Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong UMKM Balangan Daftarkan Merek untuk Perlindungan Hukum

Banjarmasin, Humas_Info – Jumat (08/08/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Layanan Kekayaan Intelektual (KI) menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Peningkatan Legalitas, Kapasitas, dan Produktivitas UMKM Kabupaten Balangan Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Pyramid Suites Banjarmasin dan diikuti oleh 70 pelaku UMKM.

Dengan mengangkat tema “Pentingnya Perlindungan Merek Dagang untuk UMKM”, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, memaparkan sejumlah materi penting, di antaranya manfaat pendaftaran merek, prosedur, serta tips agar merek tidak tertolak saat proses verifikasi.

“Mendaftarkan merek bukan hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk. Merek yang terdaftar menjadi identitas yang sah, bisa digunakan sendiri atau diberi izin kepada pihak lain, bahkan dapat melarang pihak yang ingin menggunakan tanpa izin,” jelasnya.

Peserta dibekali pengetahuan mulai dari cara memilih nama merek yang unik, mudah diingat, dan tidak memiliki kesamaan dengan merek lain, hingga teknis pengecekan melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Narasumber juga menyoroti potensi pendaftaran merek kolektif bagi kawasan yang memiliki produk khas, seperti contoh di Sungai Jingah dengan kain sasirangan, yang diharapkan dapat diaplikasikan di Kabupaten Balangan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan harapannya agar merek-merek milik UMKM Balangan segera didaftarkan.

“Prinsip perlindungan HKI adalah siapa yang pertama mendaftarkan, dia yang memiliki hak. Dengan pendaftaran merek, UMKM akan mendapatkan perlindungan hukum dan peluang ekonomi yang lebih besar,” tegasnya.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id